

Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Dan Pengemis Di Ruang Publik

Dewi Ayu Lestari¹⁾, Hary Priyanto²⁾, Safrieta Jatu Permatasari³⁾,

^{1) 2) 3)} Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹⁾email: lestariyyyy@gmail.com

²⁾email: harysangabi@unitomo.ac.id

³⁾email: safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan pengemis dan pengamen di berbagai area publik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan dan ketertiban umum belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengemis dan pengamen dengan fokus pada aspek program, organisasi pelaksana, dan sasaran kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di pasar, taman kota, kawasan wisata, dan area persimpangan jalan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek program penanganan masih didominasi oleh penertiban jangka pendek dan belum terintegrasi dengan pembinaan serta pemberdayaan ekonomi. Dari aspek pelaksana, keterbatasan kapasitas dan lemahnya koordinasi lintas organisasi menghambat efektivitas kebijakan. Sedangkan pada aspek sasaran, heterogenitas karakteristik pengemis dan pengamen serta keterbatasan alternatif penghidupan menyebabkan perubahan kondisi sasaran belum signifikan. Pembahasan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan memerlukan integrasi program, penguatan organisasi pelaksana, dan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kemiskinan Perkotaan; Ruang Publik

ABSTRACT

The presence of beggars and buskers in various public areas in Banyuwangi Regency indicates that poverty alleviation and public order policies have not been fully effective. This study aims to analyze the implementation of policies to address beggars and buskers, focusing on program aspects, implementing organizations, and policy targets. The study used a descriptive qualitative approach with locations in markets, city parks, tourist areas, and intersections. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the program aspect of handling is still dominated by short-term enforcement and has not been integrated with economic development and empowerment. From the

implementation aspect, limited capacity and weak cross-organizational coordination hamper the effectiveness of the policy. Meanwhile, from the target aspect, the heterogeneity of the characteristics of beggars and buskers and limited livelihood alternatives have resulted in insignificant changes in the conditions of the targets. The discussion emphasizes that the success of the policy requires program integration, strengthening of implementing organizations, and a sustainable empowerment approach oriented towards the needs of the targets.

Keywords: Policy Implementation; Urban Poverty; Public Space

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan penurunan masalah kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Banyuwangi, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan kompleks yang tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar serta ketidakadilan perlakuan terhadap kelompok rentan dalam ruang-ruang publik. Fenomena ini tampak nyata melalui keberadaan pengamen dan pengemis yang masih banyak dijumpai di berbagai area publik strategis, seperti Pasar Rogojampi, Pasar Blambangan, Pasar Genteng, Taman Sritanjung, Taman Blambangan, Plengsengan Pantai Boom, RTH Maron Genteng, hingga persimpangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di pusat aktivitas masyarakat.

Kemunculan pengamen dan pengemis di ruang publik tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kemiskinan struktural yang dialami sebagian masyarakat. Majidah et al. (2025) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong individu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, rendahnya keterampilan, serta ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih aktivitas mengamen dan mengemis sebagai strategi bertahan hidup. Safinah et al. (2024) juga menyebutkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh ketidakmampuan individu pada usia produktif, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta faktor personal dan lingkungan yang saling berkelindan.

Kabupaten Banyuwangi mencatat angka kemiskinan relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Banyuwangi pada tahun 2025 berada pada angka 6,13 persen. Capaian ini dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, angka agregat tersebut

menyimpan paradoks sosial karena di balik keberhasilan makro tersebut masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kerentanan dan bergantung pada aktivitas informal di ruang publik. Keberadaan pengamen dan pengemis di pasar tradisional, taman kota, kawasan wisata, dan simpang jalan utama menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan merata.

Kehadiran pengamen dan pengemis di area publik menimbulkan persoalan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Aktivitas meminta-minta yang dilakukan secara berulang, bahkan cenderung memaksa, menciptakan rasa tidak nyaman bagi pengunjung ruang publik. Hal ini sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara dengan pengunjung Taman Sritanjung yang menyatakan pengamen dan pengemis kerap tidak mau pergi sebelum diberi uang, bahkan menunjukkan sikap agresif ketika pemberian dianggap tidak sesuai harapan. Fenomena tersebut memperkuat pandangan bahwa kemiskinan berpotensi melahirkan masalah sosial lanjutan, seperti menurunnya kualitas interaksi sosial, meningkatnya konflik mikro, serta terganggunya fungsi ruang publik sebagai ruang rekreasi dan interaksi masyarakat (Madhania et al., 2023).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejatinya telah memiliki kerangka regulatif dalam menangani persoalan ini, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut menegaskan penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, implementasi kebijakan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjamin hak setiap individu atas jaminan sosial demi kehidupan yang bermartabat.

Implementasi kebijakan penanganan pengamen dan pengemis di area publik masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pembinaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) sering bersifat temporer dan belum sepenuhnya mampu mencegah kembalinya pengamen dan pengemis ke lokasi yang sama. Kegagalan implementasi kebijakan sosial disebabkan lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pendekatan rehabilitatif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Efendi, et al., 2025; Hidayat et al., 2023).

Penelitian ini untuk mengkaji mendalam peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani pengamen dan pengemis di berbagai area publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemerintah daerah, melalui perangkat terkait seperti Dinsos PPKB dan Satpol PP, merancang dan mengimplementasikan program, menjalankan fungsi pelaksana, dan menjangkau kelompok sasaran kebijakan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya

memberikan gambaran empiris terkait implementasi kebijakan penanganan pengamen dan pengemis di Banyuwangi, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang publik dan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sintesis penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang membantu peneliti memperjelas alur berpikir dalam menjawab masalah dalam penelitian. Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang menunjukkan persoalan pengamen dan pengemis di ruang publik sebagai fenomena sosial yang bersifat lintas wilayah dan memerlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah secara komprehensif. Nisrina (2024) dalam studi di Kabupaten Ponorogo menegaskan peran pemerintah daerah dalam penanganan pengamen dan pengemis telah dijalankan melalui penertiban dan pembinaan, namun belum optimal karena keterbatasan sarana rehabilitasi, lemahnya kepatuhan kelompok sasaran terhadap regulasi, serta masuknya pengamen dan pengemis dari luar daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang adil dan dukungan infrastruktur sosial sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan. Hidayah (2025) yang mengkaji implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Probolinggo menemukan bahwa pembinaan pengamen dan pengemis belum mencapai tujuan kebijakan secara maksimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang masih memberi ruang tumbuh bagi aktivitas mengamen dan mengemis di jalanan. Penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Sementara itu, Iskandar et al. (2019) dalam studi di Kota Makassar menyoroti mekanisme pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual berbasis kondisi sosial lokal. Penelitian ini menunjukkan pemberdayaan dapat berjalan efektif apabila mekanisme standar kebijakan disesuaikan dengan karakteristik sasaran serta didukung oleh kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, meskipun pemerintah daerah telah berperan aktif dalam penanganan pengamen dan pengemis melalui regulasi, penertiban, dan pembinaan, efektivitas kebijakan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan implementatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam konteks area publik yang beragam dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Tachjan (2006) yang berbasis program, pelaksana, dan sasaran, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan konseptual yang lebih spesifik pada level pemerintahan daerah.

2.2 Diskursus Kebijakan Penanganan Kemiskinan, Pengemis dan pengamen

Kehadiran pengemis dan pengamen di ruang publik merupakan manifestasi nyata dari persoalan kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan publik. Kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan Dye (dalam Marzali, 2016), adalah pilihan tindakan atau ketidaktindakan pemerintah dalam merespons masalah publik. Ketika fenomena pengemis dan pengamen terus berulang, hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam desain maupun implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Priyanto (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik tercermin dari pola tindakan pemerintah yang konsisten, sehingga persoalan sosial yang persisten menunjukkan efektivitas kebijakan yang belum optimal.

Kemiskinan menjadi akar struktural utama dari munculnya pengemis dan pengamen. Sukma et al (2023) memaknai kemiskinan sebagai kondisi hidup di bawah standar kelayakan akibat keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara Salsabila et al. (2024) melihat kemiskinan sebagai kegagalan kapabilitas individu dalam mengembangkan pilihan hidup. Dalam kondisi keterbatasan akses pekerjaan dan perlindungan sosial, ruang publik dimanfaatkan sebagai arena ekonomi informal untuk bertahan hidup. Kemiskinan bersifat multidimensional dan menuntut kebijakan lintas sektor yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan (Noviana & Priyanto, 2023; Azizah et al., 2025).

Pengemis dan pengamen, sebagai kelompok marjinal, sering dipersepsikan sebagai gangguan ketertiban umum, padahal secara sosiologis mereka merupakan produk dari ketimpangan sosial ekonomi. Firdaus et al . (2023) menegaskan pendekatan kebijakan yang menitikberatkan pada penertiban semata cenderung tidak efektif dan berpotensi memperkuat stigma serta eksklusi sosial. Kebijakan penanganan pengemis dan pengamen akan efektif jika terintegrasi dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Karena kebijakan publik, kemiskinan, serta fenomena pengemis dan pengamen merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan harus dipahami dalam kerangka kebijakan sosial yang komprehensif dan humanis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik fleksibilitas yang tinggi pada metode kualitatif, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis dan memahami makna yang terkandung dalam yang didapat secara individu atau kelompok secara ilmiah. Dalam pandangan Moleong (dalam Shiddiqi et al., 2024), pendekatan kualitatif sesuai dengan prinsip fenomenologis yang mendukung apresiasi dengan mencoba menilai dan menafsirkan signifikansi suatu peristiwa interaksi perilaku manusia pada situasi tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena sosial proses kebijakan, serta peran pemerintah daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen di area publik Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan pada tahun 2025. Lokus penelitian meliputi berbagai area publik strategis di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Pasar Rogojampi, Pasar Blambangan, Pasar Genteng, Taman Sritanjung, Taman Blambangan, Plongsengan Pantai Boom, RTH Maron Genteng,

serta area *traffic light*, yang dipilih berdasarkan intensitas kemunculan pengemis dan pengamen serta tingkat aktivitas masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dengan melibatkan aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen, seperti Dinsos PPKB, Satpol PP, serta masyarakat pengguna ruang publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta laporan kebijakan terkait.

Diharapkan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan masalah program pemerintah (Anjarwati et al., 2023), sehingga memungkinkan peneliti menggunakan intuisi dan pemahaman pribadi dalam proses analisis data, sehingga peneliti berkesempatan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam dan dapat mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan. Peneliti menganggap bahwa pendekatan kualitatif deskriptif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pengetahuan yang holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (Ekawati et al., 2024). Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang lebih kaya dan bermakna, memberikan kontribusi yang signifikan, dan memberikan pemahaman yang baik mengenai masalah yang dikemukakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Pengentasan Kemiskinan Pengemis dan Pengan

Program penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi merupakan turunan operasional dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketertiban umum yang ditetapkan pemerintah daerah (Perda Nomor 2 Tahun 2020). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya mencakup tiga bentuk utama, yaitu program penertiban dan pengawasan, program pembinaan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi. Ketiga bentuk program ini dirancang untuk menjawab persoalan pengemis dan pengamen di berbagai area publik, seperti pasar tradisional, taman kota, kawasan wisata, dan persimpangan jalan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Tachjan (2006) menegaskan program merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan kebijakan normatif ke dalam tindakan konkret. Program yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan mekanisme pelaksanaan yang realistis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program penanganan pengemis dan pengamen di Banyuwangi telah memiliki dasar kebijakan yang cukup kuat, tetapi dalam implementasi program masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional.

Tabel 1: Kebijakan Penanganan Kemiskinan Oleh Karena Pemerintah Kabupaten

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan
2	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM	Merupakan bagian upaya untuk pemberdayaan UMKM
3	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota Kabupaten Banyuwangi	Memberi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin
4	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Rantang Kasih	Bantuan makanan bagi Lansia demi trmenuhi kebutuhan dasar
5	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah	Bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak tidak mampu putus sekolah
6	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko	Percepatan Penanggulangan di Kabupaten Banyuwangi
7	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Jemput Bola Rawat Warga Kabupaten Banyuwangi	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan
8	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Program Siswa Asuh Sebaya	Meringankan biaya Pendidikan bagi teman sekolah yang tidak mampu
9	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas	Beasiswa mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi

Sumber: Analisis peneliti (2025)

Berbagai kebijakan tersebut merupakan pertanda legitimasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak berwenang dalam menciptakan struktur sosial yang mendukung interaksi positif antarmasyarakat dan sebagai solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan nilai sosial yang ada. Sebagaimana pandangan Priyanto (2024), kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Program penertiban dan pengawasan menjadi bentuk intervensi yang paling terlihat di lapangan. Program ini dilaksanakan oleh Satpol PP melalui kegiatan patroli rutin di area publik yang rawan aktivitas pengemis dan pengamen, seperti Pasar Rogojampi, Pasar Genteng, Taman Sritanjung, Taman Blambangan, serta area traffic light. Berdasarkan hasil observasi, penertiban cenderung bersifat reaktif dan temporer, terutama dilakukan ketika terdapat keluhan masyarakat atau pada momen tertentu seperti kegiatan besar daerah. Kondisi ini, interpretasi Priyanto et al. (2021), menyatakan bahwa penanganan masalah publik tanpa dukungan program lanjutan cenderung berdampak pada pemindahan masalah dari tempat satu ke tempat yang lain.

Program pembinaan sosial dilaksanakan oleh Dinsos PPKB melalui pendataan, pembinaan, serta pengembalian pengemis dan pengamen ke daerah asal atau keluarga masing-masing. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan, namun belum didukung oleh sistem pendampingan yang

berkelanjutan. Pembinaan umumnya bersifat jangka pendek dan lebih menekankan pada pendekatan persuasif serta pemberian nasihat sosial. Menurut Tachjan (2006), program yang tidak diikuti dengan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut berpotensi kehilangan efektivitasnya. Temuan ini juga diperkuat oleh Pratiwi et al. (2024) yang menyebutkan bahwa lemahnya kesinambungan program pembinaan menjadi salah satu faktor utama kegagalan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen.

Program pemberdayaan ekonomi menjadi aspek yang paling lemah dalam implementasi kebijakan penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun secara normatif pemberdayaan ekonomi diakui sebagai solusi jangka panjang, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum menysasar pengemis dan pengamen secara spesifik dan terstruktur. Sebagian informan menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum adanya skema pemberdayaan yang adaptif menjadi kendala utama. Zakiyah & Priyanto (2024) menegaskan bahwa tanpa ada program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat rentan atau miskin tentu akan kembali pada aktivitas informal sebelumnya sebagai bagian dari upaya bertahan hidup. Bisa sebagai pengemen, pengemsi, dan sebagainya.

Tabel 2. Program Penanggungan Kemiskinan Pada Dinsos PPKB Tahun 2025

No	Jenis Program
1	Program perlindungan dan jaminan sosial
2	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
3	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
5	Rehabilitasi sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan program HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial.
6	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
7	Program rehabilitasi sosial
8	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
9	Pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
10	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota
11	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
12	Program peningkatan kualitas keluarga
13	Program pemenuhan hak anak
14	Program perlindungan khusus anak
15	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
16	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
17	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
18	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sumber: Dinsos PPKB 2025

Tujuan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal menangani masalah masyarakat Banyuwangi adalah agar tidak semakin bertambah dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena aspek kemiskinan, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa implementasi program harus disertai komunikasi efektif sehingga membentuk kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Rendahnya komunikasi dan kolaborasi dapat mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan karena kepatuhan kelompok sasaran dipengaruhi oleh isi atau program kebijakan (Dinasty et al., 2025). Program penanganan pengamen dan pengemis harus terbuka agar muncul partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

Dari sisi desain program, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antarpogram masih lemah. Program penertiban, pembinaan, dan pemberdayaan berjalan secara parsial dan belum membentuk satu siklus kebijakan yang utuh. Priyanto & Noviana (2023) menyebutkan fragmentasi program merupakan masalah umum dalam implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal, terutama ketika koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal. Kondisi ini terlihat dari minimnya sinergi antara perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki kerangka program penanganan pengemis dan pengamen yang cukup lengkap secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Program cenderung berorientasi pada penertiban jangka pendek, sementara aspek pembinaan dan pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas desain, kesinambungan pelaksanaan, serta integrasi antarpogram dalam menjawab akar masalah kemiskinan.

4.2 Organisasi Pelaksana Penanhhnan Pengemis Dan Pengamen Di Area Publik

Pelaksana merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan publik karena menjadi aktor utama yang menerjemahkan kebijakan dan program ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam kerangka implementasi kebijakan, Tachjan (2006) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas, kewenangan, serta koordinasi organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinsos PPKB sebagai penanggung jawab aspek kesejahteraan sosial dan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum.

Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi memiliki peran strategis dalam aspek sosial dan rehabilitatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Dinsos PPKB, organisasi ini bertugas melakukan pendataan, pembinaan, serta fasilitasi pemulangan pengemis dan pengamen ke daerah asal atau keluarga. Peran ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab perlindungan dan rehabilitasi kelompok rentan. Namun demikian, temuan

penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kondisi ini memperkuat temuan Priyanto (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal.

Sementara itu, Satpol PP berperan sebagai organisasi pelaksana dalam aspek penegakan ketertiban umum. Satpol PP melaksanakan patroli, penertiban, dan pengawasan terhadap aktivitas pengemis dan pengamen di berbagai area publik, seperti pasar tradisional, taman kota, kawasan wisata, serta persimpangan lampu lalu lintas. Berdasarkan hasil observasi, tindakan Satpol PP cenderung bersifat responsif dan situasional, terutama ketika terdapat laporan masyarakat atau instruksi pimpinan daerah. Pola penertiban semacam ini umum terjadi dalam penanganan pengemis dan pengamen, tapi kurang efektif jika tidak diintegrasikan dengan pendekatan sosial yang berkelanjutan.

Dari sisi koordinasi antarorganisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Dinsos PPKB dan Satpol PP belum berjalan optimal. Koordinasi umumnya bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi dalam mekanisme kerja yang baku. Priyanto & Hentika (2024) menegaskan bahwa organisasi pelaksana kebijakan harus mampu bekerja secara terkoordinasi untuk menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat et al. (2023) yang menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi salah satu hambatan utama implementasi kebijakan sosial di daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa organisasi pelaksana masih menghadapi dilema antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesejahteraan sosial. Satpol PP, sebagai aparat penegak perda, dituntut untuk menjaga ketertiban ruang publik, sementara Dinsos PPKB dihadapkan pada kewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pengemis dan pengamen. Ketidakseimbangan peran ini sering menyebabkan penanganan di lapangan lebih menonjolkan penertiban dibandingkan dengan rehabilitasi. Ramadan et al. (2024) menyatakan bahwa dominasi pendekatan represif dalam kebijakan ketertiban umum berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran dan memperkuat stigma negatif pada kelompok marjinal.

Dari perspektif kapasitas organisasi, hasil penelitian menunjukkan belum terdapat unit atau tim khusus yang secara fokus menangani pengemis dan pengamen secara terpadu. Penanganan masih melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, sehingga perhatian pada isu ini bersaing dengan prioritas program lainnya. Firdaus et al. (2025) menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan organisasi pelaksana yang memiliki kapasitas khusus dan berorientasi jangka panjang agar intervensi kebijakan dapat berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melibatkan organisasi yang relevan dalam penanganan pengemis dan pengamen di area publik, tetapi efektivitas pelaksanaan kebijakan masih memiliki keterbatasan kapasitas organisasi, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta dominasi pendekatan penertiban dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan sosial. Temuan ini menguatkan pandangan Tachjan (2006) bahwa organisasi pelaksana bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi aktor

strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

4.3 Sasaran Kebijakan Penanganan Pengemis Dan Pengamen Area Publik

Sasaran kebijakan merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat sekaligus objek intervensi kebijakan. Dalam kerangka implementasi kebijakan, Tachjan (2006) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh ketepatan penetapan sasaran serta kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kebijakan penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi secara normatif telah didefinisikan dengan jelas, yakni individu atau kelompok yang melakukan aktivitas mengemis dan mengamen di ruang publik. Namun, dalam praktiknya, karakteristik sasaran kebijakan bersifat heterogen dan dinamis, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengemis dan pengamen di berbagai area publik Kabupaten Banyuwangi memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, mulai dari warga lokal hingga pendatang dari luar daerah, serta mencakup kelompok usia produktif, lanjut usia, hingga anak-anak. Keragaman karakteristik ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan tidak bersifat homogen. Suparlan (2023) menegaskan kelompok miskin merupakan kelompok yang kompleks dan tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan tunggal. Temuan ini memperkuat pandangan Agustin et al. (2025) bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga kebijakan yang menyasar kelompok miskin harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

Tabel 3: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banyuwangi, Tahun 2015-Triwulan 3 2025

Tahun	Garis Kemiskinan Perkapita Rupiah	Perubahan GK	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Perubahan Jumlah Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Perubahan (Po)
2015	295.185	10.181	146,00	-1,70	9,17	-0,12
2016	311.722	16.537	140,45	-5,55	8,79	-0,38
2017	319.236	7.514	138,54	-1,91	8,64	-0,15
2018	339.891	20.655	125,50	-13,04	7,8	-0,84
2019	353.873	13.982	121,37	-4,13	7,52	-0,28
2020	373.679	17.806	130,37	9,00	8,06	0,54
2021	387.084	13.405	130,93	0,55	8,07	0,01
2022	414.879	27.795	122,01	-8,92	7,51	-0,56
2023	448.928	34.049	119,52	-2,49	7,34	-0,17
2024	470.713	21.785	106,61	-12,91	6,54	-0,80
2025	485.012	14.299	100,13	-6,48	6,13	-0,41

Sumber: Badan Statistika Kabupaten, Centol

Penelitian ini menemukan sebagian pengemis dan pengamen belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Kebijakan dan program yang dijalankan lebih sering dipersepsikan sebagai bentuk penertiban atau pembatasan aktivitas, bukan sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan

sasaran kebijakan terhadap aturan yang berlaku. Tachjan (2006) menegaskan bahwa respons sasaran kebijakan sangat menentukan efektivitas implementasi, karena perubahan perilaku kelompok sasaran merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian pengemis dan pengamen cenderung kembali beraktivitas di ruang publik setelah dilakukan penertiban dan pembinaan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sasaran kebijakan belum sepenuhnya mengalami perubahan kondisi sosial-ekonomi yang signifikan. Kegagalan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen sering terjadi ketika kelompok sasaran tidak memperoleh alternatif penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Tanpa pemberdayaan ekonomi yang konkret, kelompok sasaran kebijakan akan kembali pada aktivitas mengemis dan mengamen sebagai strategi bertahan hidup.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan respons antara sasaran kebijakan yang bersifat menetap dan sasaran kebijakan yang bersifat temporer atau musiman. Pengemis dan pengamen musiman, khususnya yang berasal dari luar daerah, cenderung lebih sulit dijangkau oleh program pembinaan dan pemberdayaan karena mobilitas yang tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan menjangkau sasaran secara tepat. Ayun et al. (2025) menekankan bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan sosial, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi.

Sasaran kebijakan seharusnya diposisikan sebagai subjek kebijakan yang memiliki hak atas perlindungan dan pemberdayaan, bukan semata-mata objek penertiban. Kusman et al. (2025) menegaskan bahwa model kebijakan yang menempatkan kelompok marjinal hanya sebagai objek pengendalian sosial berpotensi memperkuat stigma dan eksklusi sosial. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian sasaran kebijakan masih mengalami stigma negatif dari masyarakat dan aparat, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap program pemerintah.

Kebijakan penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan kelompok sasaran secara normatif, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengubah kondisi kelompok sasaran secara berkelanjutan. Tantangan utama terletak pada heterogenitas karakteristik sasaran, rendahnya pemahaman dan partisipasi kelompok sasaran, serta belum tersedianya alternatif penghidupan yang memadai. Temuan ini memperkuat argumentasi Tachjan (2006) bahwa sasaran kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi, sehingga kebijakan penanganan pengemis dan pengamen perlu dirancang secara lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan kelompok sasaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Banyuwangi telah mencakup penertiban, pembinaan, dan pemberdayaan, namun implementasinya

masih didominasi oleh pendekatan jangka pendek dan belum terintegrasi, sehingga belum mampu menyentuh akar masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Dari aspek pelaksana, keterlibatan Dinsos PPKB maupun Satpol PP belum didukung koordinasi dan kapasitas kelembagaan yang memadai, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung parsial dan berorientasi pada penegakan ketertiban. Sementara pada aspek sasaran kebijakan yang heterogen, rendahnya partisipasi kelompok sasaran, serta keterbatasan alternatif penghidupan menyebabkan perubahan kondisi pengemis dan pengamen belum signifikan, sehingga efektivitas kebijakan secara keseluruhan masih belum optimal.

5.2 Saran

Pada aspek program, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengintegrasikan program penertiban, pembinaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi ke dalam satu siklus kebijakan yang berkelanjutan, dengan memperkuat program pemberdayaan berbasis keterampilan dan akses kerja agar pengemis dan pengamen memiliki alternatif penghidupan yang nyata. Program juga perlu dirancang secara adaptif sesuai karakteristik wilayah dan jenis sasaran di ruang publik. Dari sisi pelaksana, diperlukan penguatan kapasitas dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, khususnya antara Dinsos PPKB dan Satpol PP, melalui mekanisme kerja terpadu dan pembagian peran yang jelas antara pendekatan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Pembentukan tim lintas sektor yang fokus menangani pengemis dan pengamen secara berkelanjutan juga perlu dipertimbangkan. Pada aspek sasaran, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi dan pemahaman pengemis dan pengamen sebagai subjek kebijakan melalui pendampingan intensif dan berkelanjutan. Penanganan sasaran harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok, termasuk pembedaan perlakuan antara sasaran lokal dan pendatang, agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eka Nanda, Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2025). Metal Children Of Port Ketapang: The Reality Of Poverty In The Implementation Of Sustainable Development. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(2), 347–358. Doi: 10.54443/ijset.v4i2.671.
- Ahmad, M., (2021) Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng). *Jurnal Penelitian Stain Pekalongan*: Vol. 7. No. 2
- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023) Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.
- Ayun, N. Q., Priyanto, H., & Agustina, E. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penanganan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 5(2), 458-473. Doi: 10.59003/nhj.v5i2.1574

- Azizah, Fahreza Nur., Sri Wilujeng, & Hary Priyanto. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Kolaboratif Triple Helix: Suatu Identifikasi Dan Mengatasi Patologi Pelayanan Kependudukan Di Desa Sukomaju. *Nusantara Hasana Journal*, 4(8), 92–103. Doi: 10.59003/nhj.v4i8.1310.
- Badan pusat statistik kabupaten banyuwangi. Profil Kemiskinan Tahun 2025 Kabupaten Banyuwangi
- Dinasty, Puja Aulia., Hary Priyanto, & Niko Pahlevi Hentika. (2025). Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix. *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 40–53. Doi: 10.59003/nhj.v4i10.1385.
- Efendi, I., Priyanto, H., & Hentika, N.H. (2025). Analisis Kontradiksi Aktivitas Prostitusi Di Eks. Lokalisasi Pakem, Banyuwangi. *Katarsis*, 2(2), 85-95. Doi: 10.62734/kts.v2i2.567.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Sosial Science Research*, 4(1), 13038–13052. Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
- Firdaus, Royatul., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(2), 176–182. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v12i2.3199.
- Firdaus, R., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Critical Study On Policy Implementation Of Withdrawal Of Provincial Road Retributions By The Government Of Tamansari Village Based On Government Regulation 97/2012. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 306- 312. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v12i2.3199
- Firdaus, A. M., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2025). Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan Menuju Kabupaten Banyuwangi Layak Anak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 958–968. Doi: 10.59141/cerdika.v5i3.2554.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 84-97.
- Hidayat, N. A. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496-1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.
- Iskandar, A.M., & Halim, H (2019). Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar; (Studi Kasus Di Perumahan Btp Tamalanrea)
- Kusman, dkk. 2025. Literasi Kewarganegaraan: Bagian Hukum Dan Peraturan Dalam Kehidupan Bernegara; Suatu Diskursus Nilai Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Majidah, Wardah Rifkah., Safrieta Jatu Permatasari, & Hary Priyanto. (2025). Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju

- Kesejahteraan. Nusantara Hasana Journal, 4(12), 261–275. Doi: 10.59003/nhj.v4i12.1450.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. Nusantara Hasana Journal, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Marzali, A. (2016). Antropologi & Pembangunan Indonesia. Prenada Media.
- Nisrina, A. (2024). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Perspektif Siyâsah Dusturiyâh. Jurnal Antologi Hukum, 4(1), 1-20.)
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research Journal, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020, Tentang: Penanggulangan Kemiskinan.
- Pratiwi, N. E., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis Dan Pengamen Anak Di Kecamatan Banyuwangi. Jurnal Katarsis, 1(2). Doi: 10.62734/kts.v1i2.230
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. Qalamuna Journal, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H, & Hentika NP. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. Majalah Ilmiah Dian Ilmu. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Priyanto, H. (2025). Analisis Kebijakan Publik: Dasar dan Implementasi. Lamongan: Academia Publication.
- Priyanto, H., & Noviana, N. 2023. Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Purwoko,T., (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. Journal Sosiologi Volume 1, Nomor 4
- Ramadan, Iqbal., Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). Bulurejo-Banyuwangi Village Fund Postulate As Supporting The Effectiveness Of Empowering Pre-Prosperous Communities. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 8(1). Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3973.
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 8(1), 458-

465. Doi: 10.36526/santhe.v8i1.3527.
- Salsabila, A. ., Priyanto, H. ., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14-25. Doi: 10.62734/kts.v1i3.280.
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). Strategi Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Suparlan, P. (2023). Kemiskinan dan perubahan sosial. Jakarta: Obor.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemit Unpad.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.